

Peran Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah

Iwan Lakoro¹, Fitria Akibun², Rahmadia O. Ladawing³, Sri Yestin Kaluku⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

Received : 16 Mei 2026, Revised : 23 Mei 2026, Published : 2 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Iwan Lakoro

E-mail: iw4n82@gmail.com

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui fungsi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK berwenang menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kewajaran laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan publik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPK dalam menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah serta kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, studi pustaka, dan kajian literatur terhadap berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait pemeriksaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPK sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui pemberian opini audit, rekomendasi perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem pengendalian internal. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah dan instrumen penguatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Kata kunci - BPK, Kewajaran Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance

Abstract

The Supreme Audit Agency of Indonesia (BPK) plays a strategic role in promoting accountability and transparency in state financial management through its audit function on government financial statements. In carrying out its duties, BPK is authorized to assess the fairness of financial statements based on the State Financial Audit Standards (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN) to ensure that state financial management is conducted effectively, efficiently, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations. The assessment of financial statement fairness functions not only as an administrative instrument but also as a public oversight mechanism in strengthening good governance. This study aims to analyze the role of BPK in assessing the fairness of government financial statements and its contribution to enhancing accountability and transparency in state financial management. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews with relevant informants, literature reviews, and document analysis of regulations, scientific journals, and related references concerning state financial audits. The findings indicate that BPK plays a crucial role in improving the quality of government financial statements through audit opinions, governance improvement recommendations, and the strengthening of internal control

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

systems. Furthermore, BPK audit results serve as an evaluation instrument for government financial management performance and contribute to strengthening public trust in accountable and transparent governance.

Keywords - BPK, Fairness of Financial Statements, Accountability, Transparency, Good Governance

How To Cite : Lakoro, I., Akibun, F., Ladawing, R. O., & Kaluku, S. Y. (2026). Peran Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.59837/jan.v4i1.855>

Copyright ©2026 Iwan Lakoro, Fitria Akibun, Rahmadia O. Ladawing, Sri Yestin Kaluku

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Di Indonesia, tugas audit terhadap laporan keuangan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang independen dan konstitusional. Peran BPK tidak hanya sekadar melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga memberikan opini audit yang mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Opini inilah yang menjadi tolok ukur kualitas laporan keuangan pemerintah dan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di mata publik dan pemangku kepentingan (Sakti et al., 2024).

Secara teoritis, audit yang dilakukan oleh BPK berkontribusi pada peningkatan good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Temuan audit dan rekomendasi yang diberikan BPK mendorong pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperbaiki praktik pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran (Nisa et al., 2025). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberadaan opini audit memberikan dampak strategis terhadap pencegahan penyimpangan seperti deviasi anggaran dan ketidaksesuaian regulasi.

Olehnya, efektivitas peran BPK dalam konteks akuntabilitas keuangan sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap rekomendasi, kompetensi auditor, serta kualitas sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan (Akuntansi & Lhokseumawe, 2024). Temuan literatur menunjukkan bahwa meskipun BPK telah mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas, tantangan terhadap implementasi tindak lanjut rekomendasi masih menjadi isu yang perlu perhatian lebih luas.

laporan keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban fiskal, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi kinerja pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, kewajaran penyajian laporan keuangan menjadi aspek krusial yang harus dijaga agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan digunakan secara optimal oleh masyarakat, legislatif, serta pemangku kepentingan lainnya. Di sinilah peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sangat strategis, karena hasil pemeriksaannya menjadi rujukan utama dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. (Nisa et al., 2025)

Di sisi lain, pemberian opini audit tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi, seperti efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Atmaja W & Probohudono, 2018). Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi masih menjadi penyebab utama pemerintah daerah belum memperoleh opini WTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPK tidak hanya berhenti pada pemeriksaan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, keberadaan BPK berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang independen. Pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan mampu meminimalkan praktik penyimpangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik. Sejalan dengan hal tersebut, studi mengenai audit sektor publik menegaskan bahwa lembaga audit negara yang kuat dan independen merupakan prasyarat utama dalam menciptakan sistem keuangan negara yang kredibel dan berkelanjutan (Prabhawa & Prasajo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran BPK dalam menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana BPK menjalankan fungsi auditnya serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberian opini audit, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode utama berupa studi lapangan ke Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada 5 November 2025. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh pemahaman langsung mengenai bentuk dan efektivitas peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan langsung ke unit kerja BPK yang relevan dengan pemeriksaan sistem keuangan berbasis digital. Selama kegiatan lapangan, tim peneliti melaksanakan diskusi interaktif dengan pemeriksa dan pejabat struktural, serta melakukan observasi terhadap proses pemeriksaan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara.

Selama kegiatan lapangan, tim peneliti melaksanakan diskusi interaktif dengan pegawai dan pemeriksa terkait, serta melakukan pengamatan langsung terhadap proses kerja pemeriksaan dan pengawasan. Fokus pengamatan meliputi mekanisme pengawasan atas implementasi sistem keuangan digital, prosedur pengendalian internal, serta kebijakan yang diterapkan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, dilakukan pencatatan sistematis terhadap alur pemeriksaan, metode evaluasi risiko, serta strategi BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran BPK dalam merespons perkembangan inovasi keuangan digital dari perspektif pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2019). Tahapan analisis meliputi proses reduksi data, pengelompokan kategori, penentuan tema-tema utama, serta penafsiran makna temuan penelitian secara sistematis.

Fokus kajian utama yang relevan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: (1) efektivitas peran BPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara; (2) karakteristik risiko dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada entitas pemerintah sebagai dampak dari perkembangan teknologi keuangan; dan (3) kondisi tata kelola serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo. Melalui pendekatan ini, analisis tematik digunakan untuk mengungkap pola-pola temuan yang mencerminkan kinerja pemeriksaan BPK, efektivitas sistem pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan entitas pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran strategis BPK dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika digitalisasi sistem keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi lapangan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen dalam mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kegiatan ini menunjukkan bahwa BPK tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemeriksa laporan keuangan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang baik, khususnya di tengah perkembangan sistem keuangan berbasis digital.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan di BPK dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan, hingga penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Dalam setiap tahapan tersebut, BPK menempatkan prinsip profesionalisme, independensi, dan objektivitas sebagai landasan utama. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dengan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan entitas pemerintah.

Dari aspek pengawasan terhadap sistem keuangan berbasis digital, BPK telah menyesuaikan pendekatan pemeriksaannya dengan perkembangan teknologi informasi. Hasil diskusi dan observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem keuangan digital di lingkungan pemerintah membawa dua implikasi utama, yaitu peningkatan efisiensi dan transparansi, sekaligus munculnya risiko baru yang berkaitan dengan keamanan sistem, keandalan data, serta potensi penyimpangan berbasis teknologi.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa efektivitas peran BPK sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian intern pada entitas yang diperiksa. Entitas dengan sistem pengendalian intern yang kuat cenderung mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih andal dan memperoleh opini audit yang lebih baik. Sebaliknya, kelemahan dalam pengendalian intern masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi munculnya temuan pemeriksaan, khususnya terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan administrasi pengelolaan keuangan.

Dalam konteks pemberian opini audit, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa opini BPK bukan semata-mata bentuk penilaian administratif, melainkan representasi dari tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan suatu entitas pemerintah. Opini audit menjadi indikator penting bagi publik dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian, peran BPK sangat strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dari sisi tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah, khususnya yang relevan dengan Provinsi Gorontalo, hasil analisis menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK berkontribusi langsung dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kelemahan pengelolaan keuangan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas rekomendasi tersebut sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti temuan BPK.

Hasil studi lapangan mengindikasikan bahwa adaptasi BPK terhadap sistem keuangan berbasis digital semakin memperkuat efektivitas pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan membantu meningkatkan akurasi analisis data, memperluas cakupan pengujian, serta mempercepat proses identifikasi risiko dan potensi penyimpangan. Namun, pada saat yang sama, digitalisasi juga menuntut peningkatan kapasitas auditor dan penguatan pengendalian keamanan sistem agar integritas data tetap terjaga.

Pembahasan ini juga menguatkan perspektif bahwa BPK berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang independen dalam sistem pemerintahan. Keberadaan BPK menjadi penyeimbang terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel. Melalui fungsi pemeriksaannya, BPK mendorong terwujudnya prinsip good governance, yakni

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Secara keseluruhan, hasil studi lapangan di Kantor BPK Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa peran BPK sangat vital dalam menjamin kewajaran laporan keuangan pemerintah, mengawasi implementasi sistem keuangan digital, serta memperkuat tata kelola keuangan negara. Temuan ini sejalan dengan kerangka teoritis yang menyatakan bahwa lembaga audit negara yang kuat dan independen merupakan prasyarat utama bagi terciptanya sistem keuangan negara yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Tabel 1.

Analisis Tematik Efektivitas Peran BPK dalam Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan atas Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Tema Utama	Kategori	Indikator Temuan	Deskripsi Hasil Analisis
Independensi dan Objektivitas Pemeriksaan	Kedudukan BPK sebagai lembaga negara independen	Tidak adanya intervensi dalam proses pemeriksaan	BPK menjalankan fungsi pemeriksaan secara bebas dan mandiri, sehingga hasil pemeriksaan dan opini audit dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan objektif.
Kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan	Penerapan SPKN dan SAP	Konsistensi prosedur pemeriksaan	Proses audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjamin kualitas serta keseragaman hasil pemeriksaan.
Kualitas Sistem Pengendalian Intern	Evaluasi pengendalian intern entitas	Identifikasi kelemahan SPI	BPK menempatkan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern sebagai fokus utama untuk menilai risiko dan potensi penyimpangan keuangan negara.
Efektivitas Pemberian Opini Audit	Ketepatan penilaian kewajaran laporan keuangan	Kesesuaian opini dengan temuan pemeriksaan	Opini audit BPK mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap Sistem Keuangan Digital	Adaptasi pemeriksaan berbasis teknologi	Evaluasi keamanan dan keandalan sistem	BPK telah menyesuaikan metode pemeriksaan dengan perkembangan sistem keuangan digital untuk mengantisipasi risiko teknologi dan manipulasi data.
Transparansi dan Akuntabilitas Publik	Publikasi hasil pemeriksaan	Aksesibilitas laporan hasil pemeriksaan	Laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen utama dalam mendorong keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
Tindak Lanjut Rekomendasi	Kepatuhan entitas terhadap rekomendasi BPK	Persentase penyelesaian tindak lanjut	Efektivitas peran BPK sangat dipengaruhi oleh keseriusan entitas pemerintah dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pencegahan Penyimpangan Keuangan	Deteksi dini risiko penyalahgunaan anggaran	Penurunan potensi kerugian negara	Pemeriksaan BPK berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal untuk meminimalkan praktik penyimpangan dan meningkatkan integritas pengelolaan keuangan negara.

Sumber: Analisis Penelitian, 2025

Analisis tematik menunjukkan bahwa efektivitas peran BPK sangat bergantung pada konsistensi penerapan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta kekuatan sistem pengendalian intern pada entitas yang diperiksa. BPK telah menjalankan fungsi pemeriksaan secara independen dan objektif, namun kelemahan pengendalian intern masih menjadi faktor utama munculnya temuan pemeriksaan dan memengaruhi kualitas opini audit.

Temuan juga memperlihatkan bahwa pemberian opini audit oleh BPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan kualitas tata kelola keuangan suatu entitas. Opini yang diberikan menjadi indikator utama tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dari hasil analisis, terlihat bahwa entitas dengan sistem pengendalian intern yang kuat cenderung mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih andal, sedangkan kelemahan dalam pengendalian intern masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi munculnya temuan pemeriksaan dan menurunnya kualitas opini audit.

Dalam konteks perkembangan sistem keuangan berbasis digital, analisis tematik mengungkap bahwa BPK telah melakukan adaptasi metode pemeriksaan dengan memasukkan aspek evaluasi keamanan sistem, keandalan data, serta potensi risiko teknologi. Hal ini menegaskan bahwa peran BPK tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen keuangan konvensional, tetapi juga mencakup pengawasan atas infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara saat ini. Meskipun demikian, kompleksitas teknologi digital menuntut peningkatan kapasitas auditor agar pengawasan tetap efektif dan responsif terhadap dinamika risiko baru.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas peran BPK sangat dipengaruhi oleh tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Tabel 1 menegaskan bahwa rekomendasi BPK merupakan instrumen strategis untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, lemahnya komitmen sebagian entitas pemerintah dalam menindaklanjuti temuan audit menyebabkan fungsi pengawasan BPK belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas publik, publikasi laporan hasil pemeriksaan BPK telah berperan penting dalam membuka akses informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini memperkuat posisi BPK sebagai mekanisme kontrol eksternal yang kredibel. Namun, analisis tematik juga menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi kebijakan publik masih perlu ditingkatkan agar dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek formal pertanggungjawaban, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran BPK tidak hanya bergantung pada kualitas pemeriksaan dan pemberian opini audit, tetapi juga pada kekuatan sistem pengendalian intern entitas, keseriusan tindak lanjut rekomendasi, serta kemampuan BPK dalam merespons tantangan digitalisasi keuangan publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan peran BPK harus dilakukan secara simultan melalui peningkatan kapasitas pemeriksa, penguatan pengendalian intern pemerintah, serta komitmen bersama untuk menjadikan hasil pemeriksaan sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan negara yang berkelanjutan.

Tabel 2.

Pemetaan Keterkaitan Tema, Teori, dan Kebijakan

Tema Utama	Landasan Teori	Kebijakan/Regulasi Terkait	Implikasi terhadap Peran BPK
Independensi dan Objektivitas Pemeriksaan	Teori Audit Sektor Publik dan Teori Independensi Auditor	UUD 1945 Pasal 23E, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	Menegaskan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dari intervensi dan berwenang memberikan opini audit.
Penerapan Standar	Teori Standarisasi Audit dan	Standar Pemeriksaan	Menjamin kualitas, konsistensi, dan kredibilitas hasil pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan	Akuntabilitas Publik	Keuangan Negara (SPKN)	
Kualitas Sistem Pengendalian Intern	Teori Sistem Pengendalian Intern (COSO)	PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Menjadi dasar BPK dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan dan potensi risiko penyimpangan.
Pemberian Opini Audit	Teori Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Opini audit BPK menjadi tolok ukur akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah.
Pengawasan Sistem Keuangan Digital	Teori Manajemen Risiko dan Audit Berbasis Teknologi	Kebijakan SPBE dan transformasi digital pemerintah	Mendorong BPK menyesuaikan metode pemeriksaan terhadap risiko teknologi dan keamanan data.
Tindak Lanjut Rekomendasi	Teori Continuous Improvement dan Governance	UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Menentukan efektivitas nyata pemeriksaan BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Transparansi dan Akuntabilitas Publik	Teori Good Governance	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memperkuat fungsi BPK sebagai mekanisme kontrol eksternal yang dipercaya publik.
Pencegahan Penyimpangan Keuangan	Teori Pengawasan dan Deterrence Effect	Regulasi pengelolaan keuangan negara dan daerah	Menjadikan pemeriksaan BPK sebagai instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Sumber: Analisis Penelitian, 2025

Analisis Integratif Dan Implikasi Akademik

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya ditentukan oleh kekuatan mandat konstitusional dan independensinya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian intern entitas yang diperiksa serta keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK berfungsi sebagai *Supreme Audit Institution* yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Namun, efektivitas pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal apabila rekomendasi audit hanya berhenti pada tataran administratif tanpa perubahan substantif dalam praktik pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan (Darma & Apriliani, 2012) yang menyatakan bahwa efektivitas lembaga audit negara sangat bergantung pada independensi kelembagaan serta kapasitas entitas auditee dalam merespons hasil audit sebagai instrumen perbaikan tata kelola keuangan publik.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa opini audit BPK bukan sekadar produk teknis pemeriksaan, melainkan representasi kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan suatu entitas pemerintah. Opini yang baik mencerminkan kuatnya sistem pengendalian intern, sedangkan opini yang rendah umumnya berkorelasi dengan kelemahan pengendalian serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. (Pramono, 2021) menegaskan bahwa kelemahan pengendalian intern menjadi salah satu faktor utama munculnya temuan audit dan potensi kerugian negara, sehingga penguatan internal control merupakan prasyarat utama efektivitas pengawasan BPK.

Dari perspektif akademik, penelitian ini menguatkan teori audit sektor publik yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menempatkan lembaga audit negara sebagai mekanisme kontrol eksternal yang krusial dalam mewujudkan *good governance*. (Ikhsan & Sulastrri, n.d.) menyatakan bahwa keberhasilan audit BPK tidak berhenti pada penyampaian laporan hasil pemeriksaan, tetapi ditentukan oleh sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara konsisten oleh entitas pemerintah. Dengan demikian, tindak lanjut rekomendasi menjadi variabel strategis dalam menilai efektivitas riil pengawasan BPK.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya bahwa penguatan peran BPK harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah. (Ahyar et al., 2025) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan BPK terhadap keuangan daerah sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Secara konseptual, temuan ini memperluas pemahaman bahwa pengawasan BPK tidak cukup dipahami sebagai *compliance audit* semata, tetapi harus diposisikan sebagai mekanisme pembelajaran institusional (*institutional learning mechanism*) yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan negara. (Putri et al., 2025) menyebutkan bahwa peran strategis BPK terletak pada kemampuannya membangun budaya akuntabilitas, bukan hanya mengoreksi kesalahan administratif.

Dengan demikian, secara integratif penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran BPK merupakan hasil dari sinergi antara independensi lembaga, kualitas pemeriksaan, kekuatan sistem pengendalian intern, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi. Implikasi akademiknya adalah bahwa studi audit sektor publik perlu lebih menekankan dimensi pasca-audit, khususnya bagaimana hasil pemeriksaan BPK mampu mendorong perubahan perilaku pengelolaan keuangan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peran strategis dan fundamental dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara melalui mandat konstitusional yang menjamin independensi dan kewenangannya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara di Indonesia. Mandat tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi BPK untuk menjalankan fungsi audit secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi, sehingga hasil pemeriksaannya memiliki kekuatan hukum dan daya ikat yang tinggi bagi seluruh entitas pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPK tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pemeriksaan yang berlandaskan SPKN dan SAP, tetapi juga oleh kemampuan BPK dalam merespons kompleksitas pengelolaan keuangan negara di era digital. Pemeriksaan atas sistem keuangan berbasis digital, evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengujian kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek krusial dalam memastikan kewajaran laporan keuangan dan meminimalkan risiko penyimpangan, termasuk risiko yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa opini audit BPK (WTP, WDP, TW, dan TMP) merupakan indikator utama kualitas akuntabilitas keuangan negara dan tidak dapat dipahami semata sebagai hasil administratif pemeriksaan. Opini audit mencerminkan kondisi riil tata kelola keuangan pemerintah, khususnya efektivitas pengendalian intern, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kewajaran penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, opini audit berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan publik yang memiliki implikasi strategis bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan elemen kunci dalam menjembatani fungsi pengawasan dengan upaya perbaikan sistemik oleh entitas pemerintah. Namun, efektivitas rekomendasi tersebut sangat bergantung pada tingkat komitmen dan

kapasitas entitas dalam menindaklanjutinya. Tindak lanjut yang optimal mencerminkan internalisasi nilai akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum, sekaligus menjadi penentu utama keberhasilan siklus pengawasan keuangan negara yang berkelanjutan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran BPK tidak hanya terbatas pada fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai agen penguatan good governance. Melalui siklus yang terintegrasi antara mandat konstitusional, proses audit, temuan pemeriksaan, opini audit, rekomendasi, dan tindak lanjut, BPK berkontribusi langsung terhadap perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan negara, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem keuangan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengawasan keuangan negara oleh BPK ditentukan oleh sinergi antara kekuatan kelembagaan BPK, kualitas standar pemeriksaan, adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan, serta keseriusan entitas pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara bukan hanya tanggung jawab BPK semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi sistemik antara lembaga pengawas dan entitas yang diaudit dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, S., Manurung, K. I., Nurdin, M., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 300–308. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1576>
- Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2024). Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 302–311. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1408>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atmaja W, R. S. A., & Probahudono, A. N. (2018). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 81–110.
- Baimyrzaeva, M., & Kose, H. O. (2014). The Role of Supreme Audit Institutions in Improving Citizen Participation in Governance. *International Public Management Review*, 15(2), 77–90. Retrieved from <https://ipmr.net/index.php/ipmr/article/view/235>
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding regulation: Theory, strategy, and practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hadijah, S. (2019). Financial technology dan implikasinya terhadap perilaku konsumtif generasi milenial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(2), 97–108. <https://doi.org/10.21009/jebd.032.03>
- Hamdani, M. (2019). Inovasi fintech dan tantangan regulasi di era digitalisasi keuangan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.24853/jmk.8.1.45-57>
- Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 132–140. <https://doi.org/10.1086/208906>
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Penguatan fungsi BPK sebagai Supreme Audit Institution: Analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(1), 75–89. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51350>
- Lestari, F., & Andika, R. (2023). Literasi keuangan digital dan perilaku konsumtif pengguna layanan paylater. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 221–233. <https://doi.org/10.33087/ekbis.v10i3.221>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Nisa, F., Utari, S. D., & Nasution, D. A. D. (2025). The role of audit opinion in driving financial performance of provincial government: Case study based on BPK audit report. *International*

- Journal of Management, Economic and Accounting*, 3(3), 182–189. <https://doi.org/10.61306/jjmea>
- Nugroho, Y. (2022). Pengawasan OJK terhadap layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 45–59. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6173>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/fintech>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di era digital*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Fintech 2023–2027*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/fintech>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 (SNLKI 2024)*. Jakarta: Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK.
- Prabhawa, W., & Prasajo, E. (2021). Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution. *Sospol*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609>
- Pramono, A. J. (2021). RI BPK audit control analysis of state findings and losses. *Balance: Jurnal Ekonomi*, 17(2), 328–336. <https://doi.org/10.26618/jeb.v17i2.6476>
- Putri, D. A., Rahmah, M., Khairani, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 438–443.
- Rahardjo, T. (2023). Evaluasi efektivitas pengawasan OJK terhadap lembaga fintech peer to peer lending di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 11(2), 67–80. <https://doi.org/10.24843/jhrk.112.2023.07>
- Sakti, F. T., Mubarok, A. R., Irawan, D., Setia, H. A., & Afifah, Z. N. (2024). Perspective of Public Financial Management: The Role of the Ministry of Finance and the Supreme Audit. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 278–286.
- Sari, D. P., Prasetyo, A. D., & Wulandari, R. (2023). Perilaku konsumtif generasi milenial di era digital: Dampak paylater terhadap kesejahteraan finansial. *Jurnal Sosiohumaniora*, 25(1), 88–102. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.43009>
- Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(3), 183–206. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-0771\(199909\)12:3<183::AID-BDM318>3.0.CO;2-F](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0771(199909)12:3<183::AID-BDM318>3.0.CO;2-F)
- Untari, D. (2024). Statistik perkembangan layanan paylater di Indonesia: Analisis profil debitur dan tren konsumsi. *Buletin Pefindo Kredit Digital*, 4(1), 12–24.
- Wibowo, H., & Lestari, M. (2022). Analisis efektivitas kebijakan pengawasan fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101–116. <https://doi.org/10.22146/jakp.67122>